

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini ditulis dan disusun dengan judul **“PENGATURAN WILAYAH KERJA SATU PROVINSI PADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penulisan tugas akhir ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moril maupun materiil dari awal hingga selesainya tugas akhir ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan memberikan bantuan kepada Penulis:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Gunanegara, S.H., M.Hum. selaku Dosen dan Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu, mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan berbagai nasehat serta pengalaman kepada penulis;
5. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;

6. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian;
7. Kedua orang tua Penulis, kakak Penulis yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mendoakan, mendukung dan menghibur Penulis selama penulisan tugas akhir ini, selama Penulis mengemban ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, dan selama hidup Penulis;
8. Sahabat-sahabat Penulis baik di dalam lingkungan kampus UPH maupun di luar lingkungan kampus UPH yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu;
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat Penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik.

Jakarta, 4 Januari 2021

Penulis
Ivandi Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Kegunaan Penelitian	22
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Mengenai PPAT	25
2.1.1 Sejarah dan Pengertian PPAT	25
2.1.2 Tugas dan Kewenangan PPAT	30
2.1.3 PPAT Dalam UUPA	34
2.1.3.1 PPAT Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998	36
2.1.3.2 PPAT Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	38
2.2 Hirarki Norma Peraturan Perundang-Undangan	42
2.2.1 Teori Norma Hukum	42

2.2.1.1	Keberlakuan Norma Hukum.....	47
2.2.1.2	Keberlakuan Norma Peraturan.....	
	Perundang-Undangan.....	53
2.2.1.3	Materi Muatan Peraturan.....	
	Perundang-Undangan.....	59
2.2.1.4	Hukum Positif Dalam Teori Hukum.....	63
2.2.2	Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	69

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	75
3.2	Jenis Data atau Bahan Hukum.....	76
3.3	Cara Perolehan Data	77
3.4	Metode Pendekatan.....	78
3.5	Analisa Data atau Analisa Bahan Hukum.....	79

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Materi Norma Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor... 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah... Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat..... Pembuat Akta Tanah Ditinjau Dari Asas Hukum <i>Lex Posterior...</i> <i>Derogat Legi Priori</i>	80
4.2	Pengaturan Wilayah Kerja PPAT Dari Satu Kabupaten Menjadi. Satu Provinsi Yang Diatur Pasal 12 Ayat (1) Peraturan..... Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas..... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan.. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau Dari..... Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan..... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan... Peraturan Perundang-Undangan.....	106

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	131
-----	-----------------	-----

5.2 Saran.....133

DAFTAR PUSTAKA..... xii

